

ANALISIS PEMANFAATAN RUANG TERBUKA NON HIJAU SEBAGAI REPRESENTASI RUANG SOSIAL DI KAWASAN KUMUH (STUDI WILAYAH PANCURAN KOTA SALATIGA)

Jurnal Analisa Sosiologi

Januari 2021, 10 (Edisi Khusus

Sosiologi Perkotaan): 41-59

Septi Anggi Prawesti¹, Daru Purnomo², Suryo Sakti Hadiwijoyo³

Abstract

The increased the number of population leads to imbalanced space and the stress effect on space makes the open space narrower, so that the area develops dirtiness. The narrow space availability occurs in Pancuran area, Salatiga City, Central Java, Indonesia. As the solution to the narrow space, a non-green open space has been constructed in Pancuran area in 2018 in the form of a landmark called Zero Point. This research aimed to analyze the form of non-green open space utilization in Pancuran slum areas. Henry Lefebvre's theory of spatial production which consists of spatial practice, spatial representation, and space representation will be an analytical tool to explain the phenomenon of the slum area. This study used a qualitative method with a case study approach and primary and secondary data sources. The data collection technique was carried out using observation, interview, and documentation. The data analysis technique used is to sort the data, explain the data and draw conclusions. The result of the research showed that (1) the form of non-green open space (Zero Point) utilization as the representation of social space in Pancuran slum area is currently limited to the playground area for children, stopover place for the visitors coming into Pancuran area, and photographing area; (2) the social space constructed in Zero Point is the result of children's playing activity process, in turn making the space alive; (3) Zero Point can be said as an icon or symbol that can change Pancuran slum area into the organized and quality modern village one.

Keywords: *Non-Green Open Space, Space Representation, Social Space, Slum Area.*

Abstrak

Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan ruang dan efek tekanan terhadap ruang mengakibatkan ketersediaan ruang terbuka semakin sempit sehingga wilayah mengalami kekumuhan. Sempitnya ketersediaan ruang tersebut terjadi di wilayah Pancuran, Kota Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia. Solusi dari sempitnya ruang, pada tahun

^{1,2,3} Program Studi Sosiologi Universitas Kristen Satya Wacana

¹septiap17@gmail.com

Artikel yang diterbitkan Jurnal Analisa Sosiologi pada edisi khusus Sosiologi Perkotaan ini telah memenuhi syarat-syarat karya ilmiah, diproses sama seperti pada penerbitan non edisi khusus (terbitan normal), dipresentasikan di Seminar Nasional dan Konferensi Sosiologi Perkotaan "Urban Digital and Culture Transformation of Network Society" Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tanggal 5-6 Desember 2020.

2018 di wilayah Pancuran telah dibangun sebuah ruang terbuka non hijau berupa *landmark* yang diberi nama *Zero Point*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pemanfaatan ruang terbuka non hijau di kawasan kumuh Pancuran. Teori produksi ruang dari Henry Lefebvre yang terdiri atas praktik spasial, representasi ruang dan ruang representasi akan menjadi alat analisis untuk menjelaskan fenomena kawasan kumuh tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus serta dengan pengambilan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara serta dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah memilah data, memaparkan data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian diperoleh bahwa (1) bentuk pemanfaatan ruang terbuka non hijau (*Zero Point*) sebagai representasi ruang sosial di kawasan kumuh Pancuran saat ini sebatas digunakan sebagai wilayah aktivitas bermain anak-anak, tempat singgah bagi pengunjung yang memasuki wilayah Pancuran serta menjadi area berfoto, (2) ruang sosial yang terbentuk di *Zero Point* merupakan hasil dari proses aktivitas bermain anak-anak yang akhirnya menjadikan ruang tersebut hidup, (3) *Zero Point* bisa dikatakan sebagai simbol yang mampu merubah wilayah kumuh Pancuran menjadi wilayah kampung modern yang tertata dan berkualitas.

Kata Kunci: Kawasan Kumuh, Representasi Ruang, Ruang Sosial, Ruang Terbuka Non Hijau.

PENDAHULUAN

Permasalahan peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya mengakibatkan perkembangan kota juga cenderung cepat. Kota Salatiga, Jawa Tengah menjadi salah satu wilayah dengan peningkatan jumlah penduduk cukup banyak. Jumlah penduduk Kota Salatiga pada tahun 2015 sejumlah 183.815 jiwa, tahun 2016 sejumlah 186.420 jiwa, pada tahun 2017 sejumlah 188.928 jiwa serta pada tahun 2018 sejumlah 191.571 jiwa (BPS Jawa Tengah, 2019). Dengan peningkatan tersebut akan mempengaruhi kebutuhan ruang yang dapat menyebabkan banyak wilayah permukiman, khususnya di perkotaan mengalami kekumuhan. Selain itu, dorongan dari adanya kegiatan urbanisasi serta kesadaran menjaga lingkungan yang kurang juga mempengaruhi munculnya kawasan kumuh di perkotaan. Indikator kekumuhan yang dijabarkan oleh Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) meliputi 7+1 aspek yaitu (1) bangunan gedung (memiliki kepadatan tinggi tidak sesuai dengan ketentuan dalam rencana tata ruang); (2) lebar jalan lingkungan yang tidak memadai; (3) ketidaktersediaan akses air minum; (4) drainase lingkungan (ketidakmampuan mengalirkan limpasan air hujan); (5)

ketidakterediaan sistem pengelolaan air limbah; (6) ketidakterediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan; (7) ketidakterediaan sistem pengamanan secara aktif dan pasif; (8) ketidakterediaan lahan untuk ruang terbuka non-hijau/ruang terbuka publik. Selain dari 7+1 indikator tersebut, ciri dari kawasan kumuh perkotaan menurut Muta'ali juga disebutkan bahwa (1) rumah tanpa jendela/ventilasi udara, dan sinar matahari tidak dapat masuk, (2) tidak terdapat pembagian ruang/kamar sesuai dengan peruntukannya, (3) dinding dan lantai telah lapuk, (4) banyak dihuni oleh anggota rumah tangga tidak produktif, (5) kepala rumah tangga bekerja pada jenis pekerjaan berpenghasilan rendah (Muta'ali and Nugroho, 2019).

Dari hasil tinjauan Lembaga Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Salatiga, Kota Salatiga, Jawa Tengah dengan luasan 56,781 km² memiliki kawasan kumuh untuk peningkatan sebesar 21,83 hektar dan pencegahan seluas 231,82 hektar. Salah satu kawasan kumuh tersebut adalah wilayah Pancuran, Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Menurut SK Walikota Nomor 658/440/2016 tentang Lokasi Program Kota Tanpa Kumuh Di Kota Salatiga, RW IV Pancuran termasuk ke dalam lokasi prioritas peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan jumlah skor 35 point (Sutrisno, 2018). Permukiman padat penduduk yang menjadi kawasan kumuh seperti Pancuran biasanya menjadi wilayah yang memunculkan berbagai permasalahan sosial maupun lingkungan. Padahal seharusnya permukiman menjadi tempat yang harus menjamin kehidupan dan penghidupan (Fathy, 2018). Padatnya rumah hunian di dalam kawasan permukiman juga menyebabkan tekanan terhadap ruang, salah satunya ketersediaan ruang terbuka semakin sempit.

Sebagai wilayah lokasi peningkatan kualitas permukiman kumuh, Pancuran menyikapi ketidakterediaan ruang terbuka sebagai pembentuk ruang yang berkualitas untuk beraktivitas melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang dalam peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuhnya dilakukan dengan pola penanganan pemugaran, peremajaan dan pemukiman kembali. Melalui peraturan tersebut wilayah Pancuran dilakukan penanganan dengan pola peremajaan yang dilaksanakan kegiatan perombakan serta penataan

mendasar secara menyeluruh meliputi rumah, sarana prasarana, dan utilitas umum. Salah satu perombakannya adalah dengan membangun ruang terbuka non hijau. Ruang terbuka non hijau menjadi sebuah ruang yang memiliki fungsi ekologis, sosiokultural, pendukung, dan pelengkap. Fungsi ekologis membantu ruang khususnya dalam melindungi air tanah, fungsi sosiokultural menjadikan ruang terbuka non hijau sebagai tempat beraktivitas masyarakat, kegiatan ekonomi yang memanfaatkan ruang terbuka non hijau menjadi fungsi pendukung dan fungsi pelengkap untuk memperindah lingkungan, sehingga kekurangan penyediaan ruang terbuka non hijau dapat menimbulkan masalah atau konflik sosial (Soedrajat, 2009).

Pada tahun 2018 sebagai salah satu penanganannya telah dibangun sebuah ruang terbuka non hijau di Pancuran yang diberi nama “Zero Point”. Ruang terbuka non hijau tersebut kini dapat dimanfaatkan sebagai pendukung aktivitas penduduk. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 12/PRT/M 2009 ruang terbuka non hijau merupakan ruang yang dibangun dengan keterbukaan dan bukan bangunan tertutup serta tidak banyak tumbuhan hidup (Direktorat Jenderal Penataan Ruang, 2009). Ruang terbuka non hijau tersebut berupa perkerasan, yang dapat menjadi sarana untuk dimanfaatkan sebagai bentuk representasi ruang sosial penduduk sekaligus tempat yang dapat menjadi simbol baru bagi wilayah tersebut.

Pemilihan wilayah penelitian ini dilihat dari adanya ketersediaan ruang terbuka non hijau yaitu di wilayah Pancuran, Kelurahan Kutowinangun Lor, Kota Salatiga, Jawa Tengah dan Kalitaman, Kelurahan Kutowinangun Lor, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Namun juga dengan pertimbangan lain yaitu kekumuhan akibat kepadatan penduduknya. Berdasarkan hal tersebut kepadatan penduduk di dua wilayah ini menunjukkan bahwa wilayah Pancuran termasuk ke dalam kawasan kumuh dengan kepadatan penduduk lebih padat dibandingkan dengan wilayah Kalitaman. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian di wilayah Pancuran. Perbandingan kepadatan penduduk menurut data *baseline* Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang telah diolah yaitu wilayah Kalitaman sebesar 10.094 jiwa/km² sedangkan wilayah Pancuran sebesar 16.822 jiwa/km².

Realita mengenai pemanfaatan ruang terbuka non hijau di kawasan kumuh ini menarik untuk dikaji dengan perspektif sosiologi keruangan dengan pendekatan teori produksi ruang Henry Lefebvre. Menurut Lefebvre (dalam (Setiawan, 2017) mengajukan konsep triadik produksi ruang yaitu (1) praktik spasial, konsep yang menunjuk pada kegiatan sosial dan interaksinya. Spasial menekankan pada aspek aktivitas yang terjadi. Secara konkret praktik spasial merupakan jaringan interaksi dan komunikasi yang muncul di kehidupan sehari-hari; (2) representasi ruang, memberikan gambaran atau konsep sehingga sesuatu didefinisikan sebagai ruang, bisa dalam bentuk yang diucapkan seperti deskripsi atau definisi; (3) ruang representasi, menyangkut dimensi produksi ruang yang mengacu pada proses pemaknaan yang menghubungkan dengan simbol.

Teori produksi ruang dari Lefebvre dideskripsikan sebagai hubungan dialektis (Pramesti, Prabowo and Hasan, 2019). Hubungan dialektis tersebut disebut sebagai tiga konseptual oleh Henry Lefebvre atas ruang yang dibagi menjadi praktik spasial, representasi ruang dan ruang representasi. Praktik spasial ruang terbuka non hijau di Pancuran mengacu pada keterlibatan masyarakat atas keterkaitannya terhadap ruang, dalam menghidupkan ruang tersebut dengan melakukan aktivitas sosial serta interaksi di ruang terbuka non hijau (*Zero Point*). Sedangkan representasi ruang merujuk pada konsepsi dalam sebuah ruang, ruang terbuka non hijau yang dikonsepsikan sebagai ruang sosial dikarenakan aktivitas yang dilakukan masyarakat. Ruang representasi merupakan pola pikir atau bagaimana seseorang berpikir terhadap suatu tempat dengan simbol. Oleh karena itu, ruang representasi merupakan ruang yang dapat dimaknai berbeda oleh setiap individu, kelompok maupun masyarakat (Pramesti, Prabowo and Hasan, 2019).

Penelitian ini juga merujuk pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Darmawan and Utami, 2018) yang meneliti pola pemanfaatan ruang terbuka pada pemukiman kampung kota di Jakarta dengan hasil bahwa tidak ada masalah dengan sempitnya lahan karena kegiatan dari masyarakat di wilayah tersebut masih dapat dilakukan dengan memanfaatkan koridor jalan walaupun ruang tersebut tidak mendukung tetapi bisa digunakan beraktivitas dan tetap memberikan suasana nyaman, serta penelitian dari (Nugraha, 2013) yang meneliti Ruang dan Representasi

Sosial Malioboro dengan hasil bahwa sebagai ruang, Malioboro telah memenuhi syarat untuk dapat memproduksi sendiri, artinya proses produksi ruang tersebut yang menghasilkan ruang sosial.

Dari latar belakang kondisi kawasan permukiman kumuh namun telah memiliki ruang terbuka non hijau tersebut, membuat peneliti tertarik ingin mengetahui bagaimana pemanfaatan ruang terbuka non hijau sebagai representasi ruang sosial di kawasan kumuh Pancuran Kota Salatiga. Dengan tujuan penelitian adalah menjelaskan bentuk pemanfaatan ruang terbuka non hijau sebagai representasi ruang sosial di kawasan kumuh Pancuran Kota Salatiga dan teori produksi ruang dari Henry Lefebvre yang akan menjadi alat analisis untuk menjelaskan fenomenanya.

METODE PENELITIAN

Paradigma penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme yang menggambarkan realitas pemanfaatan ruang terbuka non hijau sebagai representasi ruang sosial di kawasan kumuh Pancuran Kota Salatiga, Jawa Tengah. Kemudian penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus digunakan karena penelitian ini terfokus pada satu objek yang diteliti untuk mengungkapkan sebuah fakta. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara serta dokumentasi. Unit amatan dalam penelitian ini adalah aktivitas masyarakat yang dilakukan di *Zero Point* sedangkan unit analisisnya adalah bagaimana bentuk pemanfaatan ruang terbuka non hijau di kawasan kumuh Pancuran. Informan subyek dalam penelitian adalah Kabid Kawasan Permukiman sebagai pelaksana dalam pembangunan *Zero Point* di Pancuran, Lurah Kelurahan Kutowinangun Lor, Tokoh masyarakat, dan masyarakat yang pernah mengunjungi *Zero Point* Pancuran. Pemilihan informan didasarkan pada *key person* (informan kunci). *Key person* adalah orang yang dibutuhkan untuk diwawancarai agar mendapatkan informasi atau orang yang mengetahui dan memahami fakta dari suatu penelitian (Rukajat, 2018). Pemilihan lokasi penelitian dengan pertimbangan metodologis memilih di wilayah Pancuran Kota Salatiga dikarenakan Pancuran termasuk ke dalam salah satu wilayah kumuh di Kota Salatiga serta memiliki bangunan ruang terbuka non hijau. Analisis pengecekan keabsahan data setelah melakukan

pengumpulan data menurut Miles dan Huberman (dalam (Fitrah and Luthfiyah, 2017) dibagi menjadi tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif yaitu memilah data, memaparkan data dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Gambaran Umum Kawasan Pancuran

Pancuran merupakan wilayah yang secara geografis terletak di Kelurahan Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Selain itu Pancuran juga merupakan wilayah yang berada diantara titik pusat keramaian kota. Pancuran sendiri memiliki luas wilayah 10,26 ha, jumlah penduduk 1.726 jiwa pada akhir tahun 2019 dan terdiri atas 18 RT (Rukun Tetangga). Dilihat dari angka jumlah penduduk terhadap luas wilayah cenderung termasuk ke dalam kategori kepadatan yang cukup tinggi.



Gambar 1. Peta Wilayah RW IV Pancuran

Sumber: Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kota Salatiga, 2017

Penduduk (Berdasarkan Jenis Kelamin)	Sem I Tahun 2018	Sem II Tahun 2018	Sem I Tahun 2019	Sem II Tahun 2019
Perempuan	907 jiwa	906 jiwa	903 jiwa	885 jiwa
Laki-laki	839 jiwa	840 jiwa	848 jiwa	841 jiwa

Tabel 1. Data Jumlah Penduduk di Wilayah RW IV Pancuran

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, 2020

Wilayah Pancuran yang berada di pusat Kota Salatiga dapat disebut juga sebagai “Kampung Kota”. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kampung kota adalah suatu bentuk permukiman di wilayah perkotaan yang khas di Indonesia dengan ciri-ciri yaitu:

- a. Penduduk masih memiliki sifat dan perilaku kehidupan lingkungan pedesaan yang terjalin dalam ikatan kekeluargaan yang erat
- b. Kondisi fisik bangunan dan lingkungan tidak mendukung kelayakan serta tidak beraturan.
- c. Kerapatan bangunan dan kepadatan penduduk tergolong tinggi
- d. Sarana prasarana pelayanan tidak terpenuhi dengan baik, contohnya seperti air bersih, saluran sanitasi dan drainase, tempat sampah, alat pemadam kebakaran dan lainnya

Kecenderungan pusat kota menjadi wilayah yang diminati masyarakat untuk bermukim menurut Clay dalam (Surtiani, 2006) memiliki beberapa alasan yaitu:

- a. Pusat kota adalah pusat dari seluruh kegiatan. Biasanya masyarakat yang berusia muda tertarik untuk mencari kesempatan kerja maupun mencari hiburan serta berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama di pusat kota. Setelah mendapatkan pekerjaan sebagian dari mereka ingin bermukim di kawasan pusat kota sebagai bentuk atas kemudahan menuju tempat kerja
- b. Pusat kota menjadi tempat yang memiliki berbagai instansi ataupun perusahaan untuk mencari kerja
- c. Tinggal di pusat kota merupakan *life style* karena dianggap lebih berkelas daripada diwilayah pinggiran kota maupun pedesaan
- d. Memiliki rumah di pusat kota dapat menjadi investasi yang bernilai tinggi dikemudian hari

Pusat keramaian yang berdekatan dengan Pancuran adalah Pasar Raya 1, Pasar Raya 2, *Shopping Center*, terminal angkutan umum, serta Pasar Blauran. Wilayah-wilayah pusat keramaian dengan lalu lintas yang padat tersebut menjadi tempat interaksi bagi banyak orang dengan kebiasaan-kebiasaan yang berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya, khususnya wilayah Pancuran. Dampak buruk dari padatnya keramaian pasar dan lalu lintas akhirnya mempengaruhi perilaku, kesadaran masyarakat serta kebiasaan hidup. Kebiasaan di Pasar tersebut misalnya perilaku membuang sampah di jalan tanpa ada kesadaran untuk membuang di tempat sampah. Hal ini juga dilakukan masyarakat di wilayah Pancuran. Mereka membuang segala sampah termasuk sampah rumah tangga di aliran

sungai sehingga tidak dipungkiri bahwa Pancuran menjadi wilayah yang kumuh. Selain kebiasaan hidup yang belum baik ada beberapa penyebab utama munculnya lingkungan kumuh antara lain adalah urbanisasi dan migrasi yang tinggi terutama bagi kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan rendah, sulit mendapatkan pekerjaan di pusat kota sehingga mengakibatkan masyarakat kesulitan mencicil atau sekadar menyewa rumah, kurang tegasnya terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang berbagai pembangunan fisik ataupun sejenisnya, perbaikan lingkungan yang hanya terpusat oleh masing-masing para pemilik rumah, disiplin serta kesadaran warga yang cukup rendah, kota sebagai pusat perdagangan yang akhirnya menarik minat bagi para pengusaha sehingga akhirnya bertempat tinggal di wilayah tersebut, dan semakin sempitnya lahan permukiman akibat pertambahan jumlah penduduk didukung juga oleh semakin tingginya harga tanah.

Selain itu kondisi wilayah yang kumuh tersebut dapat mencerminkan keadaan ekonomi, sosial, budaya dari masyarakat yang tinggal di permukiman tersebut. Adapun ciri-ciri kawasan kumuh juga dapat tercermin dari:

1. Penampilan fisik bangunannya yang kurang layak atau tidak sesuai dengan standar. Hal ini didukung dengan banyaknya bangunan-bangunan temporer yang berdiri serta terlihat tidak terawat
2. Pendapatan yang cukup rendah mencerminkan status ekonomi mereka juga demikian. Dan biasanya masyarakat di kawasan kumuh tergolong berpenghasilan rendah
3. Kepadatan bangunan yang tinggi dapat dilihat dari tidak adanya jarak antar bangunan maupun *siteplan* yang tidak terencana dengan baik ,
4. Kepadatan penduduk yang tinggi dan masyarakat yang tergolong heterogen,
5. Sistem sanitasi yang buruk atau tidak dalam kondisi yang baik
6. Kondisi sosial yang tidak baik dapat dilihat dengan banyaknya aksi atau tindakan kejahatan maupun kriminal
7. Banyaknya jumlah masyarakat pendatang yang bertempat tinggal dengan menyewa rumah sehingga status tinggalnya hanya sementara

Sebagai kawasan kumuh, Pancuran juga terlihat pada kebiasaan hidup sehat yang belum optimal dikarenakan belum adanya toilet dan *septic tank* di wilayah tersebut, sehingga selain untuk membuang sampah warga juga memanfaatkan aliran sungai sebagai tempat buang air besar. Selain itu wilayah Pancuran dikatakan sebagai kawasan kumuh karena tidak memiliki sarana dan prasarana layak untuk menunjang kehidupan. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah meliputi 7+1 indikator kumuh yaitu di wilayah Pancuran memiliki bangunan dengan kepadatan tinggi, lebar jalan lingkungan yang tidak memadai, tidak tersedia akses air minum, drainase tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan, tidak ada sistem pengelolaan air limbah, tidak tersedia sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, tidak ada sistem pengaman kebakaran, dan tidak memiliki ruang terbuka non-hijau/ruang terbuka publik. Selain 7+1 indikator tersebut ada beberapa faktor yang mendukung kawasan Pancuran dikatakan kumuh menurut Surtiani yaitu Pertama, penghasilan masyarakat sekitar cenderung rendah dan tidak mampu menjadikan lingkungan lebih baik dari sebelumnya; Kedua, waktu lamanya bertempat tinggal yang cenderung berada dikisaran 5-10 tahun mengakibatkan rasa memiliki dari masyarakat yang bertempat tinggal di Pancuran terhadap lingkungannya juga terhitung rendah; Ketiga, pembangunan rumah dengan menghabiskan lahan sepenuhnya menjadikan wilayah memiliki kerapatan bangunan yang sangat tinggi; Keempat, Pancuran kurang layak sebagai tempat hunian dikarenakan polusi, kurangnya air bersih, serta rawan genangan (Surtiani, 2006). Namun saat ini wilayah Pancuran memiliki perkembangan pesat setelah mendapat bantuan dari para stakeholder. Bantuan dari pemerintah tersebut terkait dengan anggaran infrastruktur yang diungkapkan oleh Enny Endang Surtiani, ST., MT Kadinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga.

“Peningkatan pada kawasan kumuh dengan beberapa tahap diantara tahun 2017-2019 kami sudah melaksanakan penataan kawasan kumuh di Kecamatan Tingkir dengan dana sebesar 9 milyar 700 juta rupiah, di Kecamatan Salatiga sebesar 6 milyar 500 juta rupiah, di Kecamatan Sidomukti 2,9 milyar rupiah, kemudian di Kecamatan Argomulyo sebesar 580 juta rupiah. Jadi kami dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memang memiliki tujuan yaitu dana dikhususkan kepada wilayah-wilayah pengembangan atau wilayah kumuh.” (Liputan

Khusus Kota Salatiga Bersama Walikota Salatiga, <https://www.youtube.com/watch?v=JLjXeJ-HuYI>

Selain Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berkolaborasi melaksanakan pembangunan lingkungan bersama dengan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kota Salatiga, kelurahan juga memiliki peran dalam proses peningkatan kawasan kumuh Pancuran. Dalam hal ini Kelurahan Kutowinangun Lor menjadi perantara antara pemerintah dengan warga Pancuran. Sebagai Lurah di Kelurahan Kutowinangun Lor Bapak Y juga mengungkapkan peran yang dilakukan Kelurahan dalam proses pembangunan di wilayah Pancuran.

“Kita selaku Pemerintah Kelurahan tentunya memfasilitasi kegiatan pembangunan itu, dalam arti fasilitas itu bukan berarti fasilitas dalam bentuk apa-apa tetapi menghubungkan antara pemerintah Kota Salatiga dengan warga tentunya dengan perangkat di RW (Rukun Warga), sebagai jembatan bagi pemerintah yang akan melaksanakan pembangunan juga menyambungkan evaluasi dari pemerintah ke warga. Jadi kami juga mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di wilayah Pancuran” (Wawancara Y, 27 Januari 2020, pukul 09.00 WIB).

Dengan adanya peran dari *stakeholder* tersebut, wilayah Pancuran berubah menjadi lebih baik dari segi infrastruktur, estetika lingkungan, ketersediaan sarana dan prasarana, serta memiliki ruang terbuka non hijau yang diberi nama *Zero Point*. Seperti yang diungkapkan oleh Seksi Pembangunan dalam Proses Pembangunan *Zero Point*.

“Awal mula sebelum menjadi Zero Point itu merupakan tempat minum (mabuk-mabukan), kawasan sisi yang landai dan miring selebar 1 meter dengan jalan setapak selebar 0,5 meter sampai 1 meter. Kemudian mengajukan pembangunan talud dan di terima Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman satu tahun kemudian dan menghasilkan Zero Point dengan panjang 24 meter dan lebar 4 meter” (Wawancara P, 1 Februari 2020, pukul 12.30 WIB).



Gambar 2. Kondisi Lingkungan Sebelum Dibangun Ruang Terbuka Non Hijau (Zero Point)

Sumber: Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kota Salatiga, 2017

Pembangunan Ruang Terbuka Non Hijau Zero Point

Awal mula pembangunan *Zero Point* Pancuran dikarenakan Pancuran menjadi salah satu kawasan yang masuk dalam Surat Keputusan Kumuh dan didampingi oleh Askot beserta fasilitator dari Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kota Salatiga. Dalam hal ini pendamping KOTAKU berperan dalam meningkatkan kualitas kawasan kumuh tersebut dengan membantu melalui pembangunan drainase, jalan, serta bagian lainnya. Kemudian dinas juga melakukan penataan ruang dengan membangun ruang terbuka non hijau berupa *landmark* yang diberi nama *Zero Point*. Bangunan tersebut dibangun oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga yang dulu pelaksanaannya dikomando oleh Kabid Kawasan Permukiman dalam pembangunan *Zero Point* di Pancuran dengan ungkapannya sebagai berikut.

“Pancuran itu berawal dari Lembaga Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam arti karena masukan Surat Keputusan (SK) kumuh karena kami fokusnya di kumuh. Kira-kira memerlukan penyelesaian kumuh seperti apa agar mereka bisa tetap eksis setelah itu dan tidak kembali kumuh. Karena konsep intinya gitu, kalau kita sudah menyelesaikan 7 indikator yaitu bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan pengamanan kebakaran apakah masyarakat tidak kembali lagi setelah itu? Tidak bisa menjamin, akhirnya dibuat taman-taman yang memberikan spot-spot agar bisa mengekspresikan, bisa sama-sama untuk bermusyawarah dan tidak hanya sekadar maju menjadi salah satu spot, tetapi itu bisa menjadi pendapatan mereka juga kedepannya” (Wawancara JS, 23 Januari 2020, pukul 09.30 WIB).

Selain dikarenakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menjalankan amanah sesuai visi-misi Walikota yaitu tentang penataan wajah kota sekaligus cita-cita menurunkan angka kemiskinan, Dinas melakukan pembangunan yang nantinya diharapkan dapat berkelanjutan. Mungkin setelah terbangun sebuah ruang dapat menjadi tempat yang digunakan untuk mengekspresikan kegiatan masyarakat maupun menjadi tempat sumber pendapatan wilayah. Pembangunan *Zero Point* sebenarnya juga dilandasi dari adanya usulan-usulan masyarakat yang disampaikan kepada Kabid Kawasan Permukiman.

“Jadi Pancuran itu ada kegelisahan, teman-teman ingin maju dari yang dikenal kampung preman, pemabuk, orang nakal dan sejenisnya. Kemudian tidak ada tempat untuk mengekspresikan apa yang ingin mereka ekspresikan atau hanya sekadar tempat kumpul, tempat nongkrong. Kalau mengandalkan balai RW (Rukun Warga), Balai RW (Rukun Warga) itu kan ruang tertutup kalau ruang tertutup identik dengan sumber ketertutupan. Anak muda sekarang lebih suka kalau terbuka dan bebas. Oleh karena itu dibuat suasana yang betul-betul terbuka karena suasana terbuka itu harapannya pikirannya lebih terbuka. Di situ juga ada view merbabu yang bagus” (Wawancara JS, 23 Januari 2020 pukul 09.30 WIB).

Konsep pembangunan yang dirancang oleh CV. Wastu Buana Adi Cipta untuk kampung jelajah wisata Pancuran Salatiga adalah titik nol atau yang sekarang diberikan nama *Zero Point*. Titik nol tersebut direncanakan menjadi titik utama Kampung Pancuran yang dilengkapi dengan mural. Dari titik nol ini dapat dilihat pemandangan kampung dari atas serta dapat melihat Gunung Merbabu.



Gambar 3. Konsep Pembangunan Ruang Terbuka Non Hijau (Zero Point)

Sumber: Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kota Salatiga, 2017

Proses pembangunan ruang terbuka non hijau ini awalnya diperkirakan selesai dalam rentang waktu 6 bulan. Namun dikarenakan terkendala dalam aspek penjualan mengakibatkan penguluran waktu sehingga hanya tersisa 4 bulan dari perkiraan awal. Dalam waktu tersebut dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman segera melakukan pembangunan dengan mengurangi beberapa item yang sebelumnya telah dikonsepsikan oleh CV. Wastu Buana Adi Cipta.

“Pancuran sempat gagal 3 kali. Karena waktu sudah semakin mendesak gagal lelang 3 kali dari waktu awal 6 bulan tetapi tinggal 4 bulan saya paksakan. Waktu 4 bulan memang mau tidak mau item yang tidak mungkin dikerjakan akan selesai tetap saya kurangi” (Wawancara JS, pada 23 Januari 2020 pukul 09.30 WIB).

Ruang terbuka non hijau di wilayah Pancuran Kota Salatiga tersebut berupa bangunan perkerasan dengan beberapa tambahan tanaman serta gambar-gambar mural yang indah. Di *Zero Point* tersebut juga memiliki sumber mata air serta diberikan fasilitas toilet umum.



Gambar 4. Ruang Terbuka Non Hijau (Zero Point) di Pancuran yang sudah dibangun

Sumber: Dokumen Pribadi, 2019

Pembahasan

Praktik Spasial

Perbandingan dari luas wilayah dengan banyaknya jumlah penduduk membuat wilayah Pancuran sangat padat, sehingga membuat bangunan rumah-rumah dari masyarakatnya sangat berhimpitan dan rata-rata tidak memiliki halaman.



Gambar 5. Rumah di wilayah Pancuran yang saling berhimpitan

Sumber: Google Earth, 2020

Kecenderungan kegiatan warga yaitu berada di sekitaran koridor jalan. Selain hanya untuk bersantai bercengkerama dengan tetangga ataupun masyarakat yang melintas, koridor jalan ini juga digunakan untuk berjualan makanan pada malam hari. Selain itu, dikarenakan saat ini sudah terbangun ruang terbuka non hijau di Pancuran, masyarakat memiliki tempat selain koridor jalan untuk beraktivitas. Ruang ini biasanya digunakan sebagai arena bermain anak-anak saat pulang sekolah maupun sore hari serta menjadi tempat singgah bagi orang-orang dari luar wilayah Pancuran yang

berkunjung. Sebelum dibangun menjadi kawasan ruang terbuka non hijau, tempat tersebut merupakan wilayah yang digunakan minum para pemabuk.

“Dulu kumuh, tempat buat mabuk-mabukan. Lalu ada perubahan, dulu dibuat mabuk-mabukan akhirnya tergeser dan sekarang sudah berkurang hampir 80%, sebagian anak-anak yang dulu mabuk kumpul disitu” (Wawancara BS, 1 Februari 2020, pukul 14.30 WIB).

Namun saat ini setelah *Zero Point* selesai dibangun, terdapat perubahan penataan ruang. Walaupun sudah mengalami perubahan, dari awal terbangun menjadi sebuah ruang yang baru, *Zero Point* ini belum pernah terselenggara suatu event yang khusus. Hanya sempat ada beberapa kegiatan seperti saat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo datang dan menyempatkan berfoto di *Zero Point*, kemudian saat kegiatan Hari Kesetiakawanan Nasional ruang *Zero Point* digunakan sebagai area untuk menghidupkan kembang api. Selain kedua kegiatan tersebut belum pernah ada rutinitas khusus lain yang dilakukan selain digunakan oleh anak-anak bermain dan tempat untuk menongkrong sehari-hari oleh masyarakat sekitar. Hal ini diungkapkan oleh Ketua RW IV Pancuran.

“Sementara ini biar hanya bangunan seperti itu dulu, untuk nongkrong saja karena tidak ada aktivitas, tidak ada yang kami persembahkan” (Wawancara BS, 1 Februari 2020, pukul 14.30 WIB)

Dengan adanya aktivitas dari anak-anak yang bermain di wilayah *Zero Point* dan menghasilkan relasi sosial berupa interaksi ataupun komunikasi menjadikan *Zero Point* tersebut memiliki keberlangsungan atas produksi ruang. Hal inilah yang disebut sebagai ruang yang hidup dikarenakan masyarakat memiliki keterkaitan tertentu atas penggunaan ruang dan rasa kepemilikan atas ruang.

Representasi Ruang

Representasi ruang merupakan kajian dimana ruang dikonsepsikan atas ruang itu sendiri. Ruang terbuka non hijau di Pancuran merupakan ruang yang digunakan untuk melakukan aktivitas sosial dari masyarakat sekitar maka ruang terbuka non hijau tersebut menjadi konsep ruang sosial. Menurut Lefebvre (dalam (Pramesiti et al. 2019) representasi ruang dapat dikaji dengan mengidentifikasi apa yang menghidupkan ruang tersebut, akibat apa yang ditimbulkan serta apa yang dirasakan oleh seseorang dengan

segala perubahan yang terjadi dengan ruang tersebut. Konseptualisasi atas ruang disampaikan dengan tujuan dikarenakan wilayah Pancuran yang memiliki kepadatan tinggi dan ruang untuk berekspresi semakin sempit, sehingga konsep pembangunan ruang terbuka sebagai pendukung aktivitas warga akhirnya dibangun. Representasi ruang *Zero Point* yang menjadi ruang sosial bagi masyarakat juga disampaikan oleh Bapak Lurah Kutowinangun Lor.

“Ya paling tidak dengan adanya Zero Point itu bentuk kegiatan-kegiatan untuk masyarakat baik pemuda, karang taruna bisa terfasilitasi di situ. Bisa sebagai sarana prasarana kegiatan sosial bagi warga di wilayah Pancuran” (Wawancara Y, 27 Januari 2020 pukul 09.00 WIB).

Dengan adanya konsep pembangunan *Zero Point* sebagai bentuk ruang bagi masyarakat wilayah Pancuran serta dukungan dari berbagai aktivitas yang menghasilkan interaksi dan akhirnya menghidupkan ruang, serta dari segala perubahan yang terjadi di ruang tersebut menjadikan representasi ruang *Zero Point* adalah sebagai ruang sosial.

Ruang Representasi

Ruang representasi juga disebut sebagai ruang yang dipersepsikan. Ruang representasi ini muncul sebagai akibat adanya hubungan antara praktik spasial dan representasi ruang. Ruang representasi juga berkaitan dengan simbol atau makna dari suatu ruang. Tujuan dari adanya pembangunan *Zero Point* yaitu untuk dapat mengubah image dari wilayah kumuh Pancuran menjadi wilayah yang tertata.

“Artinya awal cuma buat jadi tempat itu (Zero Point) dan Zero Point itu jadi simbolik. Simbolik Pancuran itu, ketika orang ingat Pancuran yang dikenal ibunya (Zero Point) dulu. Karena untuk mencari icon itu kan perlu sesuatu yang pas. Jadi kalau orang bertanya ‘Pancuran itu dimana?’ yang diingat ketika liat Pasar ada Zero Point.” (Wawancara JS, 23 Januari 2020, pukul 09.30 WIB)

Selain itu setelah wilayah Pancuran mengalami perubahan, banyak masyarakat dari luar wilayah Pancuran yang tertarik untuk berkunjung. Dari kunjungan mereka yang pernah berjalan-jalan dan singgah di wilayah *Zero Point* mengatakan bahwa kawasan ruang terbuka non hijau tersebut dapat menjadi simbol dan *icon* perubahan bagi wilayah Pancuran itu sendiri.

“Karena dengan adanya Zero Point, Pancuran itu jadi terlihat seperti kampung modern, bisa juga disebut tempat-tempat nongkrong, tempat anak-anak muda berkarya seperti hunting foto disitu. Karena spotnya juga bagus untuk foto dan nyaman untuk nongkrong. Maka dari itu dengan adanya Zero Point itu bisa merubah citra wilayah Pancuran menjadi lebih baik. Orang-orang jadi tidak berfikir kalau itu wilayah yang buruk” (Wawancara YG, 12 Februari 2020, pukul 17.20 WIB)

Penuturan lain juga disampaikan oleh Askot Mandiri Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Salatiga yang ikut ambil bagian dalam peningkatan kawasan kumuh dengan melakukan penataan infrastruktur dan pembangunan ruang terbuka non hijau *Zero Point*.

“Image jadi berubah, ada Zero Point. Oh dulu terkenal dengan kampung kumuh sekarang sudah jadi bagus, berbeda dan otomatis merubah image warga” (Wawancara YU, 23 Januari 2020, pukul 10.00 WIB).

Dari beberapa pernyataan yang telah disampaikan ruang representasi yang berada dalam dimensi imajinatif seseorang khususnya hal ini adalah masyarakat luar Pancuran serta beberapa dari lembaga mengatakan bahwa perubahan image dari hasil penataan kawasan Pancuran serta pembangunan ruang terbuka non hijau, *Zero Point* bisa menjadikan simbol baru serta sebagai *icon* perubahan wilayah Pancuran. Perubahan *icon* tersebut memang menjadi tujuan utama dikarenakan selama ini wilayah Pancuran dikenal sebagai kawasan kumuh paling tidak sekarang memiliki *Zero Point* yang secara tidak langsung menjadi area yang bersih, tertata dan berkualitas untuk melakukan kegiatan bagi masyarakat Pancuran.

KESIMPULAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk pemanfaatan ruang terbuka non hijau (*Zero Point*) di Kawasan Kumuh Pancuran saat ini sebatas digunakan untuk aktivitas bermain anak-anak, tempat singgah bagi pengunjung yang memasuki kawasan Pancuran serta menjadi area berfoto. Secara praktik spasial, *Zero Point* telah menjadi ruang yang hidup dikarenakan adanya aktivitas dari anak-anak, adanya kunjungan dari masyarakat luar Pancuran yang menghasilkan interaksi. Representasi ruang dari *Zero Point* dimanifestasikan dalam sebuah ruang yang dikonsepsikan sebagai ruang sosial dikarenakan aktivitas yang terjadi di ruang tersebut berkenaan dengan lingkup sosial (interaksi, komunikasi, atau tindakan antar

masyarakat). Ruang representasi merupakan pola pikir atau bagaimana seseorang berpikir terhadap kawasan Pancuran dengan simbol. Hal ini berkaitan dengan simbol apa yang ada di dalam benak masyarakat setelah adanya pembangunan yang merubah wilayah Pancuran. Bagi masyarakat kawasan kumuh Pancuran yang cenderung kurang memiliki ruang terbuka sebagai pendukung dalam mengekspresikan diri, pembangunan *Zero Point* menjadi solusi terbaik yang dilakukan pemerintah. Perubahan yang telah terjadi di Pancuran terutama perubahan ruang terbuka non hijau (*Zero Point*) yang dulunya sebagai tempat melakukan aktivitas negatif dan kumuh sekarang menjadi wilayah yang bersih, tertata dan berkualitas untuk melakukan aktivitas sehingga *Zero Point* menjadi ruang terbuka non hijau yang dapat menjadi icon maupun simbol perubahan Pancuran menjadi kampung modern. Sebagai ruang terbuka non hijau, *Zero Point* sudah memenuhi 2 dari 3 fungsi ruang yaitu fungsi sosiokultural sebagai tempat beraktivitas masyarakat, dan fungsi pelengkap sebagai perwujudan keindahan lingkungan. Sedangkan fungsi pendukung sebagai wadah kegiatan ekonomi belum terealisasi hingga saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Jawa Tengah (2019). *Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2015-2018*. Available at: <https://jateng.bps.go.id/statictable/2017/10/26/1533/jumlah-penduduk-dan-laju-pertumbuhan-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah-2015-2018.html> (Accessed: 5 March 2020).
- Darmawan, S. and Utami, T. B. (2018) 'Pola Pemanfaatan Ruang Terbuka pada Pemukiman Kampung Kota', *Jurnal Arsitektur, Bangunan, & Lingkungan*, 7(3), pp. 127–136.
- Direktorat Jenderal Penataan Ruang (2009) *Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan*. Available at: https://www.academia.edu/4418327/Ruang_Terbuka_Non_Hijau_dari_PU (Accessed: 29 May 2019).
- Fathy, R. (2018) *Menciptakan Permukiman Perkotaan Berkelanjutan*.

- Available at: <http://lipi.go.id/publikasi/menciptakan-permukiman-perkotaan-berkelanjutan/26584> (Accessed: 10 June 2019).
- Fitrah, M. and Luthfiyah (2017) *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Kab. Sukabumi: CV. Jejak.
- Muta'ali, L. and Nugroho, A. R. (2019) *Permukiman Kumuh di Indonesia dari Masa ke Masa: Perkembangan Program Penanganan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nugraha, G. P. S. (2013) *Ruang dan Representasi Sosial Malioboro Space and Social Representations of Malioboro*. Universitas Gadjah Mada.
- Pramesti, P. U., Prabowo, B. N. and Hasan, M. I. (2019) 'Kajian Ruang Dan Aktivitas Pasar Minggu Taman Setiabudi Banyumanik Terhadap Terbentuknya Kohesi Sosial Masyarakat', *MODUL vol 19 no 2, issues period 2019*, 19(2019), pp. 110–118.
- Rukajat, A. (2018) *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Setiawan, A. (2017) *Produksi Ruang Sosial Sebagai Konsep Pengembangan Ruang Perkotaan (Kajian atas Teori Ruang Henry Levebvre)*. Available at: <https://www.researchgate.net/publication/318501936> (Accessed: 15 June 2019).
- Soedrajat, I. (2009) *Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di Kawasan Perkotaan*. Available at: [retrieved from johannes.lecture.ub.ac.id/](http://johannes.lecture.ub.ac.id/) (Accessed: 29 July 2019).
- Surtiani, E. E. (2006) *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terciptanya Kawasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Pusat Kota*. Universitas Diponegoro.
- Sutrisno, B. (2018) *Kampung Pancuran, Perjalanan dari Kumuh Menjadi Tangguh*. Available at: <http://kotaku.pu.go.id/view/7613/kampung-pancuran-perjalanan-dari-kumuh-menjadi-tangguh> (Accessed: 5 September 2019).